

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGEMBANGAN WISATA
KAMPUNG KOPI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN KAMPAR 2023**

Oleh : Ikhbal Kurniawan

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The role of the village government in developing coffee village tourism in Nagari Koto Tuo, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency has the potential to be developed into a coffee village that will provide benefits to the local community. Nagari Koto Tuo has an increasing natural tourist attraction and has many coffee industries that are managed from generation to generation from ancestors so that it has unique coffee characteristics.

A total of 177 coffee powder business trademarks are registered which makes Nagari Koto Tuo a coffee powder producing village. However, it has not yet achieved maximum results such as the incomplete tourism facilities such as the unavailability of rest areas (places) for visiting tourists.

This study aims to determine how the role of the Koto Tuo Nagari Government in developing coffee village tourism. The method used in this research is a qualitative method using a descriptive approach. The theory used in this study uses the theory of Titana and Gayatri (2005) which has 3 indicator components, namely motivator, facilitator and dynamizer. The results of the study state that the role of the Government of Nagari Koto Tuo, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency is still not going well in the development of Nagari Koto Tuo coffee village tourism in accordance with the indicators set by the research. The inhibiting factor is human resources (HR) who still lack awareness or are still not working with the government.

Keywords: Role, Nagari Government, Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan, karena pariwisata telah memberi dampak positif terhadap penyediaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Merujuk paparan Ahmad Arison dalam Anonim (2001), potensi desa wisata yakni adat istiadat masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata seperti: kehidupan sehari-hari, upacara adat, rumah adat, budaya dan kesenian asli daerah, makanan minuman tradisional, kekayaan alam, dan lain-lain. Jadi peluang pengembangan desa wisata sangat besar sebagai upaya diversifikasi destinasi wisata dalam konteks pengembangan pariwisata budaya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi yang dimaksud adalah Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sebagai mana yang dimaksudkan Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan

Pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk lebih mendekatkan Pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan di atas maka dalam sebuah Kabupaten/Kota dapat dibentuk suatu Nagari. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang berbunyi “dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Nagari, Nagari yang dimaksud memiliki kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraannya memiliki asas-asas yang menjadi dasar atau tumpuan dalam pelaksanaan setiap urusan-urusan yang ada di Nagari. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dikatakan bahwa pengaturan Nagari yaitu; a) Rekognisi, b) subsidiaritas, c) keberagaman, d) kebersamaan, e) kegotongroyongan, f) kekeluargaan, g) musyawarah, h) demokrasi, i) kemandirian, j) partisipasi, k) kesetaraan, l) pemberdayaan, dan m) keberlanjutan.

Awalnya, penyelenggaraan mengenai Pemerintahan Nagari hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, namun pada tahun 2014 Pemerintah menetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang menguatkan posisi nagari sebagai Daerah otonom. Pada Undang-Undang Nagari tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari. Kemudian, disebutkan juga bahwa Pemerintah Nagari yaitu Wali Nagari atau bisa disebut juga dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau juga disebut dengan nama lain. Wali Nagri ini mempunyai Hak, kewajiban dan wewenang daerah.

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari. (Dharmawan, Dkk, 2014: 1-2). Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar kesuatu negara atau daerah dan dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan atau minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.

Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai

dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Dalam pengembangan suatu objek wisata ada hal yang harus diketahui yaitu faktor pendukung pengembangannya seperti pembangunan terhadap sarana pariwisata, selain itu ada juga prasarana pariwisata semua usaha perlu ditingkatkan agar objek wisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Walaupun suatu objek wisata mempunyai wisata alam yang sangat baik, tetapi tidak didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik maka objek wisata tersebut tidak dapat berkembang dengan baik.

Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dibentuknya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, menunjukkan pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Hal ini dapat lebih jelas bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya.

Kabupaten Tanah Datar atau di sebut juga dengan Luhak Nan Tuo merupakan kabupaten yang di kenal karna adat dan budaya yang ada di

Sumatra Barat yang menjadikan salah satu tujuan wisatawan manca negara. Tanah Datar pada saat ini mempunyai potensi wisata yang harus dikembangkan sebagai objek wisata baik potensi alam, budaya sejarah dan buatan (Hasmi, 2020). Tanah Datar memiliki 10 objek wisata unggulan yaitu Istana Pagaruyung, Puncak Aua Sarumpun, Panorama Tabek Patah, Nagari Tuo Pariangan, Tanjung Mutiara, Puncak Pato, Air Terjun Lembah Anai, Batu angkek-angkek, dan juga pemandian air panas di Padang Ganting.

Dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UU Desa, pemerintah desa Nagari Koto Tuo dapat merancang dan mengimplementasikan program-program pengembangan kampung kopi secara lebih komprehensif, memberdayakan masyarakat, serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha kopi di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pemerintah desa memiliki peran penting dalam penerapannya, yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang mencakup prioritas penggunaan Dana Desa

sesuai dengan Permendes PD TT No.3 Tahun 2021.

2. Mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Permendes PD TT No. 3 Tahun 2021, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas dengan melibatkan masyarakat desa dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

Dengan peran pemerintah desa yang aktif dalam penerapan Permendes PD TT No. 3 Tahun 2021, diharapkan Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di desa.

Gambar 1
Berita antarasumber.com



Dilansir dari ANTARASUMBAR 2021, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat dikenal dengan daerah penghasil bubuk kopi dan akan dikembangkan menjadi kampung kopi. Camat Sungai Tarab Afrizal di Sungai Tarab mengatakan “dengan menjadikan Nagari Koto Tuo sebagai kampung kopi membuat daerah itu lebih banyak dikunjungi masyarakat sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar”, katanya. Nagari Koto Tuo hanya melakukan pengelolaan biji kopi mulai dari menjemur, merendang, menggiling, mengemas, dan memasarkan saja. Atas dasar inilah muncul ide untuk menjadikan Koto Tuo sebagai kampung kopi dengan Konsep wisatawan menikmati kopi di ruang terbuka sambil melihat proses pembuatan kopi itu sendiri.

Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Koto Tuo sangat besar dengan adanya 177 merek dagang usaha bubuk kopi terdaftar yang menjadikan Nagari Koto Tuo sebagai Nagari penghasil bubuk kopi. Sejalan dengan perkembangan merek dagang kopi bubuk di Nagari Kota Tuo. Peralatan untuk mengelola kopi bubuk juga berkembang, seperti mereka sudah ada menggunakan perendang dan diputar dengan bantuan tangan dan ada juga menggunakan mesin perendang yang tidak memerlukan tangan untuk memutar tetapi

mesinlah yang memutar perendang tersebut. Selain dari perkembangannya, mesin perendang kopi, penduduk Nagari Kota Tuo sudah menggunakan mesin penggiling kopi untuk dijadikan bubuk kopi.

Berdasarkan fenomena diatas Nagari Koto Tuo memiliki potensi wisata yang besar berdasarkan kondisi geografis Nagari Koto yang terletak di kaki gunung Merapi serta pengelolaan kopi sudah menjadi ciri khas nagari tersebut. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengembangkan wisata di daerah tersebut, maka dari itu penulis mengambil judul “*Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengembangan Wisata kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam pengembangan wisata kampung kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tahun 2023?
2. Apa saja kendala dalam mengembangkan wisata kampung kopi di Nagari Kota Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka peneliti mengemukakan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah nagari dalam mengembangkan wisata kampung di Nagari Kota Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tahun 2023?
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengembangkan wisata kampung kopi Nagari Kota Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tahun 2023?

Kemudian manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.

D. Kerangka Teori

Menurut Mulat Wigati Abdullah (2006 : 53) Secara etimologi, peran adalah perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan secara terminologi peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (200 : 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sutanto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakuakn dengan situasi tertentu.
- b. Harapan peran yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Peran dibentuk agar dapat mengetahui keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan tujuannya yaitu: keterlibatan dalam keputusan atau menjalankan keputusan, bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain, organisasi kerja yaitu bersama setara (berbagi peran) dan penetapan tujuan yaitu ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

Pitana Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah wisata daerahnya sebagai berikut:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator, di perlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha

di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk memberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dimamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang idea, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu skotholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar di antaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Dari beberapa penjelasan teori di atas, maka peran seseorang atau kelompok sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta membuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam mendeskripsikan Peran Pemerintah Nagari dalam Pengembangan Wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 menggunakan teori dari Pitana Gayatri yang mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator.

1. Motivator

Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah nagari dalam pengembangan wisata kampung kopi

di Nagari Koto Tuo Tahun 2023 sebagai *Motivator*, diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, pemerintah nagari merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atau kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivator kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaannya (Pitana dan Gayatri 2005, 95).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Nagari Koto beserta Pemerintah Kecamatan ingin mengembangkan wisata kampung kopi melalui program Satu Nagari Satu Event, melalui event tersebut Nagari Koto Tuo berpeluang untuk memperkenalkan diri sebagai kampung kopi. Hal tersebut sesuai dengan visi misinya kabupaten tanah datar yaitu dalam pengembangan pariwisata. Diharapkan melalui event ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar baik domestik maupun manca negara.

Satu Nagari Satu Event

Satu Nagari Satu Event merupakan program unggulan dari pemda Kab. Tanah Datar yang tertuang dalam Perda Kab. Tanah Datar No 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Kegiatan Satu Nagari Satu Event juga diperkuat dengan Perbup Kab. Tanah Datar No 22 Tahun 2022 tentang

Roadmap Pelaksanaan Progul Dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Gambar 2
Kegiatan Satu Nagari Satu Event



Kegiatan Satu Nagari Satu Event memiliki konsep partisipatif atau gerakan bersama yang melibatkan seluruh bagian masyarakat yang ada di setiap nagari di Kab. Tanah Datar dan kegiatan ini mengusung prinsip oleh kita, dari kita dan untuk kita semua. Dalam kegiatan ini seluruh elemen nagari berlomba-lomba mulai dari Festival, Alek Anak Nagari, Kuliner, Permainan Tradisional, Pertunjukan Seni, Budaya Anak Nagari, Bazar UMKM dan masih banyaknya kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing nagari. Selain itu kegiatan Satu Nagari Satu Event akan memberikan ruang kreatif bagi anak nagari yang ada di Kab. Tanah Datar untuk menampilkan kreativitas yang ada di nagari masing-masing.

Gambar 3
Pameran Produk di Kecamatan Sungai Tarab



Dalam rangka memaksimalkan potensi pengembangan wisata kampung kopi Nagari Koto Tuo, maka pemerintah nagari juga berupaya memotivasi pihak investor swasta agar turut berperan serta atau terlibat dalam rangka pengembangan wisata Kampung Kopi.

Selain memotivasi investor pemerintah Nagari juga memotivasi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk turut dalam pengembangan wisata Kampung Kopi Nagari Koto Tuo. Pekalu UKM turut terlibat dalam menjaga kualitas olahan kopi khas nagari Koto Tuo. Sebagai mana sesuai dengan visi dan misi usaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo adalah “Menjadikan usaha kopi bubuk Nagari Koto Tuo memiliki pengolahan yang terbaik dan berkembang terus menerus melalui produk berkualitas dan di kenal orang banyak” sedangkan misi dari usaha kopi bubuk Nagari Koto Tuo yaitu :

- a) Mempertahankan keberadaan usaha pengelolaan kopi bubuk
- b) Memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri

- c) Menggunakan peralatan yang lebih maju
- d) Menggunakan bahan baku yang berkualitas

Kebijakan Hak Cipta Produk Kopi

Berdasarkan kebijakan dari pemerintah nagari pelaku usaha tidak dipungut biaya dalam pengurusan surat izin usaha. Jika dilihat dari penentuan merek dari sentra usaha bubuk Kopi di Nagari Koto Tuo ini apabila suatu usaha telah di patenkan atau disebut juga dengan hak cipta maka suatu usaha baru apabila mempunyai kesamaan merek, desain bahkan logo maka sipemilik usaha yang telah mempatenkan tadi berhak melaporkan usaha baru tadi di karenakan plagiat atau tiruan atas suatu produk yang telah dipatenkan, oleh karena itu jika ada seseorang mendirikan usaha sentra baru bubuk kopi maka seandainya lebih memikirkan kualitas dan kuantitas dari suatu usaha tersebut agar tidak mengalami konflik dengan usaha yang telah lama berdiri. Dalam penentuan merek dan logo tidak boleh sama satu sama lain, itu dikarenakan waktu awal pendirian usaha bubuk kopi di Nagari Koto Tuo masing-masing pelaku usaha harus memikirkan apa logo dan merek yang akan mereka gunakan jangan sampai mereka mendirikan usaha akan bermasalah dengan pelaku usaha yang lama di karenakan logo dan merek yang sama.

Gambar 4
Contoh Kemasan Merek Kopi



Oleh karena itu hak paten atau hak cipta suatu produk sangat diperhitungkan dalam mendirikan usaha bubuk kopi di Nagari Koto Tuo, agar para pelaku usaha tidak mengalami konflik dengan pelaku usaha yang lain dengan mengingat banyaknya merek-merek dan logo kopi di Nagari Koto Tuo tersebut.

2. Fasilitator

Peran *Fasilitator* merupakan peran pemerintah nagari sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, peran ini sendiri dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

Peran pemerintah nagari sebagai *fasilitator* diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di nagarinya. Peran *fasilitator* pemerintah nagari dapat meliputi 2

(dua) bagian, yaitu sebagai fasilitator pemberdayaan bidang pengembangan pembangunan sumber daya manusia dan sebagai *fasilitator* pengembangan pembangunan dibidang fasilitas fisik.

Gambar 5
Bimbingan Teknik Kewirausahaan



Peran Pemerintah Nagari sebagai *fasilitator* dalam meningkatkan sumber daya manusia sudah dilakukan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi, pembinaan, pembentukan kelompok sadar wisata namun masih belum efektif hal ini dikarenakan, pemberian sosialisasi, peminaan masih bersifat kuratif dan pasif terlihat pelatihan yang diberikan baru terlaksana sekali, kelompok sadar wisata yang dibentuk belum berjalan serta tidak adanya perencanaan khusus serta pembangunan fisik pariwisata masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya fasilitas pendukung yang dibangun seperti palang penunjuk arah objek wisata, ruang ganti/toilet, tong sampah, pembangunan rest area, tempat parkir dan lain-lain, serta infrastruktur jalan menuju objek wisata masih belum memadai.

3. Dinamisator

Pemerintah Nagari sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak swasta dengan

masyarakat agar dapat menciptakan suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan peran pemerintah nagari sebagai dinamisor yaitu:

- a. Memberikan bimbingan dan pengarahan untuk pelestarian wisata. Memberikan petunjuk atau pedoman kepada masyarakat sekitar Nagari Koto Tuo untuk menjaga kebersihan dan melestarikan adat dan budaya yang ada di nagari tersebut. (event tahunan)
- b. Memberikan pelatihan atau edukas. Dalam pengembangan wisata Pemerintah Nagari Koto Tuo sudah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan pembinaan dan pelatihan barista. Sebanyak 16 orang putra daerah Nagari Koto Tuo di latih untuk menjadi Barista.

Gambar 6
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata



Kendala dalam Pengembangan Wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang di maksud adalah aparatur dan masyarakat pada umumnya. Kinerja Bumrag sebagai badan usaha yang menaungi dalam bidang mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat nagari masih belum berjalan dengan baik.

SDM sangatlah penting artinya dalam menyukseskan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar khususnya Nagari Koto Tuo, Aparatur pemerintah melaksanakan tugas dengan dan masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan dan keramah tamahan aparatur dan masyarakat menjadi komponen yang penting dalam kepariwisataan.

2. Dana

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Nagari Koto Tuo hanya melakukan pinjaman modal usaha saja

pada BUMNAG seharusnya kehadiran badan usaha milik nagari bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, wali Nagari dan pengurus BUMNAG seharusnya harus jeli dalam melihat usaha yang menguntungkan bagi pengembangan wisata dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Anggaran pendapatan belanja Nagari (APBNag) koto tuo tahun 2022 sebesar Rp 1,8 miliar lebih, sisa atau silpa Rp 472 juta dan realisasi Rp 1,3 milyar. Sumber APBNag tersebut yaitu dari PAN, dana desa, ADN, DAK kab, dbh, jasa giro dan dari Silpa. Sedangkan APBNag Koto Tuo Pada tahun 2023 berjumlah Rp 1,4 milyar, diantaranya telah direalisasikan untuk pembangunan fisik lainnya. Kemudian mitigasi bencana, bantuan peternakan untuk masyarakat. Realisasi lainnya pada bidang pemerintahan dan sosial budaya. Bidang ekonomi diantaranya pengadaan bibit kopi dan gerakan penanaman kopi, bantuan keluarga miskin dan lainnya.

3. Masalah Lahan dan Perkebunan

Dalam pengembangan suatu wisata tidak dapat selamanya berjalan dengan baik. Terdapat pula berbagai hambatan atau kendala pemerintah dalam pengembangan suatu kawasan objek wisata. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Koto Tuo diatas penulis menyimpulkan bahwa lahan di Nagari Koto Tuo ini Mayoritas milik pribadi pelaku usaha bubuk kopi sehingga pemerintah tidak dapat berperan

aktif dalam pengembangan wisata kampung kopi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat di simpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengembangan Wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 belum mencapai hasil yang maksimal hal ini dilandasi 3 indikator pemerintah nagari yaitu Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. 3 indikator tersebut masih belum berjalan dengan baik dalam pengembangan wisata kampung kopi Nagari Koto Tuo .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan mengenai Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengembangan Wisata Kampung Kopi di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

1. Pemerntah Nagari Koto Tuo harus mengamati kembali perannya agar 3 indikator tersebut berjalan dengan maksimal sesuai dengan tiga indikator yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator.
2. Pemerintah Nagari Koto Tuo hendaknya menyalurkan dana lebih

dan memasukkan dalam RKP(rencana kerja pemerintah) pengembangan wisata kampung kopi ini mengingat kopi merupakan ikon Nagari Koto Tuo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mulat Wigati 2006. *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktural, Proses*, (Alih Bahasa Nunuk Adiarni), Jakarta : Binarupa Aksara
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (2005). Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan.
- Marlyn. M Friedman. 1998. *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*, Jakarta : ECG
- Ndaraha, Taziduhu, 2011. *Kibemologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Rasyid. 1992. *Desa, Masyarakat desa dan pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jurnal

- Amalia, R. 2021. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Sumur Tujuh Cikajayaan Dan Dampaknya*

Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga(Studi Pada Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan) (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277-293.
- I Made Adi Dharmawan, Dkk. 2014. *Development Strategy of Tourism Village in Belimbing Village, Pupuan District, Tabanan Regency*. *Journal of Agribusiness and Agritourism*, Vol3, No.1
- Satrio, A. H. M. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Desa Wisata Kampung Pulesari*.
- Sayudi Permata, S. 2024. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Bumi Perkemahan Bukik Tobek Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa

Berita atau Website

AntaraneWS.com “*Ini tujuannya Nagari Koto Tuo Sungai Tarab dikembangkan jadi kampung kopi*”
<https://sumbar.antaraneWS.com/berita/447298/ini-tujuannya-nagari-koto-tuo-sungai-tarab-dikembangkan-jadi-kampung-kopi>. Diakses pada 07 Maret 2023.